

MEMPERKUAT PARTISIPASI SEMESTA WUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Oleh

Ma'ruf Zahran Sabran

TEMA memperingati HARDIKNAS tahun 2026 di atas, menuntut semua elemen masyarakat untuk terlibat guna pendidikan berkualitas untuk semua. Partisipasi yang diperluas bahwa pendidikan bermutu tidak hanya kewajiban negara, tapi juga semesta. Meski demikian, pemerintah jangan berlepastangan dengan cara menurunkan anggaran pendidikan. Apapun yang bermutu pasti melibatkan unsur finansial mahal. Penguatan infrastruktur penting, penguatan militer penting, penguatan pangan nasional penting. Pendidikan juga penting, sebab hanya guru yang sanggup melahirkan banyak profesi di dunia ini. Melalui alumni yang berkiprah di semua lini.

Memperkuat partisipasi semesta untuk pendidikan artinya pendidikan bukan hanya melibatkan birokrasi. Tapi semua unsur ikut serta memperkuat sendi-sendi pendidikan, terutama keluarga. Perilaku peserta didik di sekolah merupakan gambaran keluarga. Peserta didik yang pendiam belum tentu tidak paham. Kadang di rumah ia sudah mendapatkan segalanya. Perhatian, kasih, sayang, cinta, rukun dan kedamaian yang cukup. Tidak perlu lagi "over acting" di sekolah.

Partisipasi semesta berarti pendidikan dibebaskan dari tekanan unsur manapun, baik sipil maupun militer. Kecuali itu, pendidikan harus dikelola secara desentralisasi. Mengingat tujuh belas ribu pulau di Indonesia memiliki corak ragam budaya yang berbeda, bahasa, agama, rasa dan selera. Bahayanya, sentralisasi pendidikan hanya akan membunuh keragaman hayati yang hidup di masyarakat majemuk, dan merusak masa depan negeri. Artinya, elemen bangsa wajib menghormati kekhasan daerah. Darinya, pendidikan semesta mampu berkreasi melahirkan produksi dalam negeri yang bermutu. Karena tugas pendidikan adalah mengupayakan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh disesatkan oleh iklan produk luar negeri. Tujuan pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan dari hegemoni asing, blok timur dan blok barat, menjadi fakta kemandirian. Indonesia mesti berdiri di atas kaki sendiri. Pengalaman hidup terjajah di bawah tekanan ekonomi global, sungguh menyengsarakan. Buktinya hari ini, kurs satu dolar AS senilai tujuh belas ribu rupiah.

Pendidikan menjadi benteng pertama dan terakhir kekuatan bangsa. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang menang bergulat. Tapi bangsa yang bertahan demi harga diri untuk tidak dijual ke bangsa asing. Indonesia "bocor" karena ada pengkhianat. Buktinya, kekayaan alamnya, darat, laut, udara dikeruk sampai habis. Hutang luar negeri yang tak terbayar, malah rugi? Lalu, kebijakan fiskal seperti apa? Mau untung jadi buntung. Detik ini diperlukan pemimpin yang sanggup berkata jujur. Jujur bahwa bangsa ini masih miskin, banyak orang yang belum bisa hidup layak. Maka diatasi bersama, dicari akar masalah, solusi menyeluruh dan partisipasi masyarakat utuh. Bukan dengan melaporkan rakyat sudah sejahtera dan kaya. Orang kaya di

Indonesia jumlahnya sekitar 7%. Merekalah yang pamer kekayaan, berlibur ke mancanegara. Selebihnya, rakyat hidup dalam kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Ekonomi Indonesia tidak jauh beda dengan Vietnam.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jangan disebut pemborosan anggaran apalagi beban negara. Beban negara adalah pekerjaan membuat hutang luar negeri sebanyak mungkin sehingga tidak mampu bayar. Kebijakan yang tidak bijak akan berdampak buruk bagi rakyat. Bahwa rakyat yang menanggung hutang. Setelah tidak mampu lagi membayar hutang, apa yang dilepas? Pulau beserta rakyat, atau menjadi negara boneka yang berada di bawah protektorat regulasi negara penjamin. Akibatnya, setiap bayi yang lahir sudah mengantongi sertifikat hutang. Buktinya, rakyat harus membayar kegetiran hidup dan sesak nafas dengan harga kebutuhan pokok yang melejit dan item pajak di semua sektor penjualan, pembelian, dan aset yang membelit.

Pasar bebas dunia akan menjadikan rakyat Indonesia kehilangan pendapatan dan mata pencaharian. Karena go internasional mengakibatkan perusahaan asing berhak "bertengger" di negeri kita tercinta. Dan mereka menyiapkan tenaga kerja asing yang mereka seleksi sendiri. Lalu, kita siapa? Penonton di gelanggang, bukan pemain.

Jadi, keberhasilan pendidikan yang bermutu ialah ketika rakyat semesta makmur. Realita yang harus diupayakan adalah pendidikan dengan subsidi penuh pemerintah. Harga kebutuhan sehari-hari murah dan mudah. Kesehatan terjamin dan masa tua bahagia. Akses ke bursa lapangan pekerjaan tersedia dengan gaji yang tidak timpang jauh antara atasan dan bawahan. Bebas dari intimidasi dan tanpa takut dipecat secara tiba-tiba. Karena UU Perlindungan Buruh tidak saja diperlukan, tapi diberlakukan. Kontrol ketat terhadap sesuatu yang merusak kesehatan dan mental rakyat. Melalui aparat pemerintah yang bersih dan tegas terhadap barang haram selundupan di lintas batas, keluar-masuk wilayah negara.

Indikator pendidikan yang bermutu juga ketika rakyat sanggup mengatakan yang benar adalah benar. Sanggup mengatakan yang salah adalah salah. Pendidikan dirancang tidak untuk menjadi pengkhianat bangsa. Tapi mendidik jujur, amanah dan cinta NKRI. Satu kebijakan yang dicetuskan untuk kebaikan rakyat lebih mulia daripada salat sunah enam puluh rakaat. Dan pemimpin yang adil sehingga berhasil mengantar kemakmuran rakyat lahir batin, enam puluh tahun lebih dahulu masuk surga daripada ahli ibadah.

Sebaliknya, pemimpin yang aniaya juga hasil dari pendidikan tinggi. Membuat terus kesepakatan hutang luar negeri pertanda tidak percaya kepada pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan tidak percaya kepada kemampuan rakyat sendiri. Apa yang dicicil adalah bunga pinjaman, belum menebus pokok pinjaman. Menjerit, tercekik, terjerat kasus hutang, tergadai. Rakyat menangis menebus semua kesalahan yang dibuat oleh oknum petinggi negeri. Menjadi kenyataan yang dahulu ditakutkan oleh Presiden RI pertama: "Menjadi tamu di rumah sendiri." Lebih miris, menjadi babu di negeri sendiri. Wahai Tuhan, selamatkan Indonesia kami.